DAMPAK BENCANA PADA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

*Oleh : **Bambang Marwanta***

ABSTRAK

Pantai Utara Jakarta yang membentang dari Kamal Muara sampai Marunda tak lama lagi akan berubah wajah menjadi daratan yang diisi dengan berbagai aktifitas yang mendukung perekonomian Jakarta. Reklamasi Pantura Jakarta ini bahkan direncanakan mengambil wilayah dari Kab. Bekasi timur sampai Kab. Tangerang. Kegiatan reklamasi yang direncanakan mulai tahun 2003 ini sedikit terhambat karena Kementrian Lingkungan Hidup menolak reklamasi pantura ini. Studi amdal memberikan hasil bahwa reklamasi pantura Jakarta memberikan dampak lingkungan yang sangat besar. Reklamasi pantura akan menghabiskan lahan seluas 2.700 ha, yang terbentang sepanjang 32 Km, dengan mengambil lebar dari bibir pantai ke arah laut sejauh 1,5 Km dan kedalaman maksimal delapan meter. Untuk reklamasi pantura tersebut dibutuhkan material sebanyak 330 juta m^3. Untuk keperluan tersebut deposit pasir laut berdasarkan studi terdapat di Tanjung Burung, pulau Tidung, Tanjung Kait, Tanjung Pontang, pantai Cemara, pasir Putih, serta bekas pertambangan timah di pulau Bangka dan Belitung. Peruntukannya kawasan reklamasi dibagi dalam 3 zona: 1) Zona Barat untuk kawasan permukiman; 2) Zona Tengah untuk kawasan revitalisasi Sunda Kelapa, kawasan pusat niaga, serta kawasan rekreasi dan permukiman; 3) Zona Timur untuk kawasan Pelabuhan Tanjung Priok serta kawasan pergudangan, industri, dan pusat distribusi. Keuntungan ekonomis dari kegiatan tersebut harus juga memperhitungkan dampak bencana yang akan ditimbulkan. Minimal ada lima dampak yang akan muncul, yaitu dampak terhadap banjir di Jakarta, gangguan operasional beberapa proyek vital, potensi konflik dengan masyarakat, kerusakan ekosistem laut, serta memperluas potensi pencemaran ke arah perairan Pulau Seribu.

I. PENDAHULUAN

Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang terbentang sepanjang 32 Km, akan direklamasi dengan mengambil lebar dari bibir pantai ke arah laut sejauh 1,5 Km dan kedalaman maksimal delapan meter. Lahan reklamasi akan menghabiskan lahan seluas 2.700 ha. Selain untuk pembangunan kegiatan industri, di atas lahan reklamasi itu juga untuk fasilitas kegiatan pariwisata, perkantoran, pusat bisnis, sarana transportasi dan perumahan penduduk untuk 750.000 jiwa. Kawasan reklamasi meliputi Kab. Bekasi di Timur hingga Kab. Tangerang di sebelah barat. Rencana kegiatan reklamasi akan dimulai tahun 2003 ini hingga 2015, tetapi karena pihak Kementrian Lingkungan Hidup memandang dampak lingkungan yang besar, maka proyek spektakuler ini masih tertunda. Rencana kegiatan pembangunan pusat bisnis, perkantoran, industri, pergudangan dan apartemen akan dilakukan hingga tahun 2010, sedangkan perumahan dan pariwisata yang rencananya terletak di bagian barat dan timur akan dibangun mulai tahun 2005 hingga 2015.

Reklamasi pantai utara Jakarta dimaksudkan untuk memperoleh nilai tambah, yang hasilnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah pantai. Di sini ada program subsidi silang, antara pembangunan kota pantai yang setaraf dengan kota pantai lain di dunia, dan pembangunan infra struktur di lingkungan kawasan yang ada dan yang akan dibangun.

Dari sisi perubahan lingkungan, reklamasi pantai akan membawa risiko perubahan sistem tata air di kawasan pesisir lama. Arus sungai menjadi semakin lambat dan sedimentasi lumpur semakin cepat. Untuk itu kalau hal tersebut tetap dilakukan, harus dibutuhkan pengerukan lumpur sungai setiap saat, supaya sirkulasi air normal dan tidak menambah agenda bencana banjir yang sudah menjadi langganan kota Jakarta.

Karena kawasan reklamasi pasti lebih tinggi daripada wilayah pesisir lama, maka di kawasan pesisir lama harus dilakukan peninggian badan jalan, pengerukan sungai, pembuatan tanggul, dan kegiatan lainnya, termasuk pengoperasian pompa-pompa air, pada daerah-daerah genangan baru. Untuk itu aspek pengaliran air ke muara harus lebih diperhatikan, agar air tidak mandeg. Sistim polder di sepanjang pantai hasil reklamasi harus ada siap beroperasi setiap saat.

Tanah hasil reklamasi perlu konsolidasi dan memerlukan waktu yang sangat lama, bila di atasnya akan dibangun bangunan maka konstruksinya harus memperhitungkan aspek konsolidasi tanah tersebut. Jika tidak, bangunan retak-retak dan berbahaya bagi fasilitas umum.

II. RENCANA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

Akhir-akhir ini timbul polemik besar antara Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dengan Kementrian Lingkungan Hidup soal reklamasi pantai utara Jakarta. Dasar pijakan dilakukannya reklamasi pantai utara Jakarta adalah Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara (pantura) Jakarta dengan pengurukan 2.700 hektar laut di utara Jakarta. Walaupun masih ditentang Kementrian Lingkungan Hidup, sepertinya reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta tetap akan dilanjutkan, yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi lingkungan pantura Jakarta yang rusak parah. Meskipun pihak DKI Jakarta memberikan argumentasi demikian, dari kacamata lingkungan hidup berbicara lain. Hasil studi amdal menjelaskan bahwa kegiatan reklamasi tersebut memberikan dampak lingkungan yang besar, oleh sebab itu maka Kementrian Lingkungan Hidup mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Nomor 14 Tahun 2003, yang isinya menolak rencana kegiatan Pemerintah propinsi DKI yang akan mereklamasi pantura Jakarta. Dari situlah polemik tentang dimulainya kegiatan reklamasi ini berkelanjutan hingga saat ini.

Selain Keppres No 52 Tahun 1995, dasar yang dijadikan landasan reklamasi pantura Jakarta adalah Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang penyelenggaraan reklamasi di DKI, dalam konsideransnya menyebutkan bahwa sesuai dengan Keppres No. 17 Tahun 1994, Kawasan Pantai Utara adalah termasuk kategori Kawasan Andalan yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota.

2.1. Tujuan Reklamasi

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, reklamasi pantura akan menghabiskan lahan seluas 2.700 ha, yang terbentang sepanjang 32 Km, dengan mengambil lebar dari bibir pantai ke arah laut sejauh 1,5 Km dan kedalaman maksimal delapan meter. Rencananya, diatas lahan reklamasi itu, selain untuk pembangunan kegiatan industri, juga untuk fasilitas kegiatan pariwisata, perkantoran, pusat bisnis, sarana transportasi dan perumahan penduduk untuk 750.000 juta jiwa. Kawasan ini meliputi Kab. Bekasi di Timur hingga Kab. Tangerang di sebelah barat.

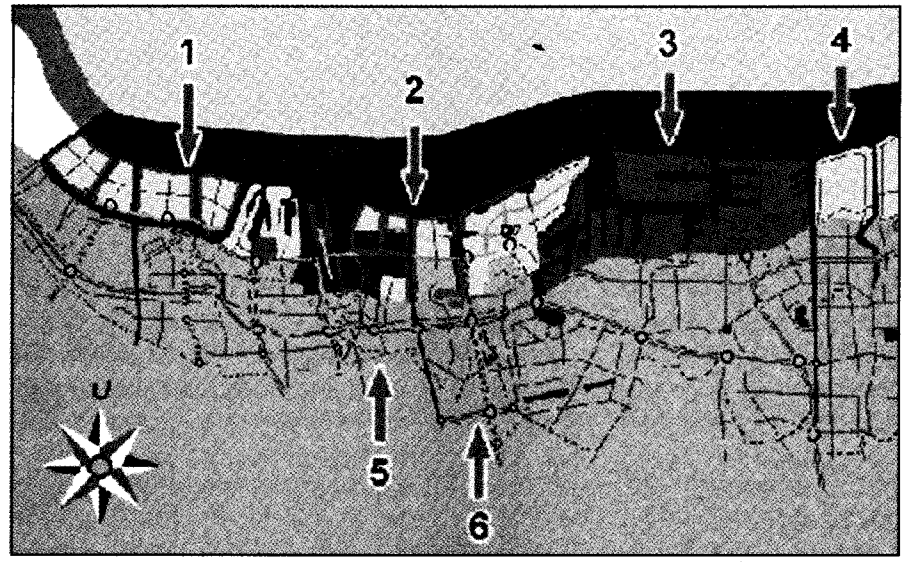

Gambar 1. Rencana reklamasi Pantai Utara Jakarta, (Sumber : BP Pantura)

Adapun tujuan dari reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta adalah :

- Membangun kawasan *waterfront* yang akan memposisikan kota Jakarta sejajar dengan kota-kota penting lainnya di dunia.
- Tercapainya pemanfaatan ruang berkualitas untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota pelayanan yang strategis dan memiliki daya saing yang tinggi dalam perkembangan dunia.
- Mengendalikan pertumbuhan kota Jakarta ke arah Selatan untuk melindungi wilayah Selatan Jakarta sebagai daerah resapan air.
- Mendorong orientasi perkembangan kota dengan menciptakan peluang ke arah Utara.
- Efisiensi struktur kota melalui keterpaduan penggunaan lahan, prasarana angkutan, dan fasilitas perkotaan.
- Akselerasi perkembangan prasarana angkutan massal demi efisiensi jalur angkutan umum Utara-Selatan dan Timur-Barat.
- Mengembangkan program perbaikan, peningkatan, dan rehabilitasi kualitas lingkungan, termasuk upaya konservasi dan pemugaran fungsi ekologis kawasan Jakarta Utara.
- Mempertahankan nilai historis cagar budaya melalui program pemugaran.
- Membangun kembali, memperkuat, dan menciptakan poros yang kuat antara Monumen Nasional dengan kawasan bersejarah di wilayah Jakarta Utara.

Kawasan reklamasi ini diapit dua sungai besar yang berpotensi sebagai sumber daya air, yakni Sungai Ciliwung di timur dan Sungai Cisadane di barat. Juga ada 13 sungai kecil lainnya yang bermuara ke Teluk Jakarta. Metode reklamasi pantura Jakarta akan menggunakan cara pengurukan sehingga lokasi reklamasi akan lebih tinggi dari permukaan air laut. Berbeda dengan negara Belanda menggunakan tanggul sehingga areal reklamasi lebih rendah dari permukaan air laut. Untuk mereklamasinya dibutuhkan 330 juta

meter kubik bahan urukan, termasuk pasir. Untuk keperluan tersebut deposit pasir laut berdasarkan studi terdapat di Tanjung Burung, pulau Tidung, Tanjung Kait, Tanjung Pontang, pantai Cemara, pasir Putih, serta bekas pertambangan timah di pulau Bangka dan Belitung.

Dalam kegiatan pengurukan, resiko yang akan dihadapi adalah abrasi di kawasan yang akan diambil pasirnya. Contoh paling nyata adalah pulau Nipah di Batam, yang nyaris tenggelam akibat pengerukan pasir laut oleh pengusaha untuk mereklamasi Singapura. Reklamasi Bandara Sukarno Hatta yang menggunakan pasir laut dari perairan Indramayu, dampaknya berupa abrasi yang tidak terelakkan di pesisir sepanjang Eretan, bahkan kini telah mendekati jalan raya Pantura. Lainnya, kasus reklamasi Pantai Indah Kapuk Jakarta, yang telah terbukti mendatangkan banjir bagi penduduk setempat, apalagi jika pengurukan tersebut berskala besar.

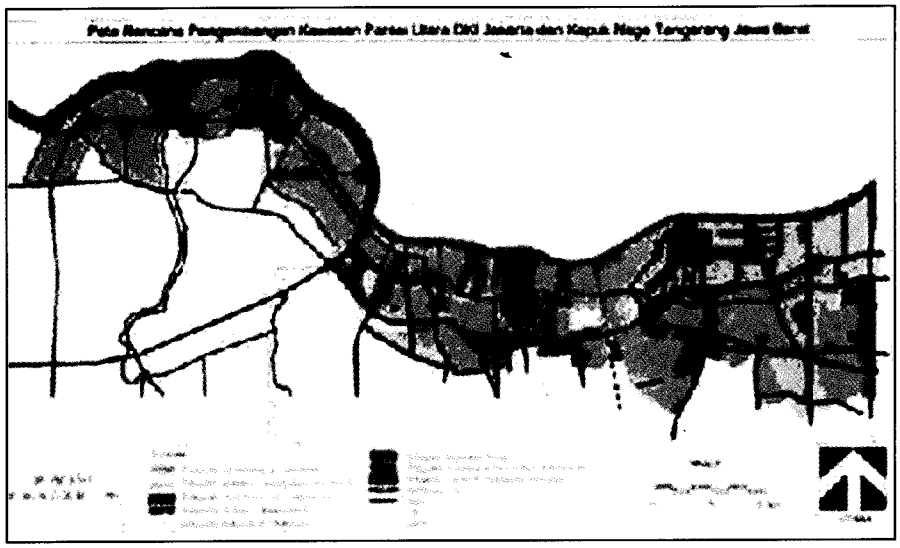

Gambar 2. Peta rencana pengembangan Kawasan Pantura DKI Jakarta dan Kapuk Naga, Tangerang Jawa Barat (Sumber : Indoconstruction)

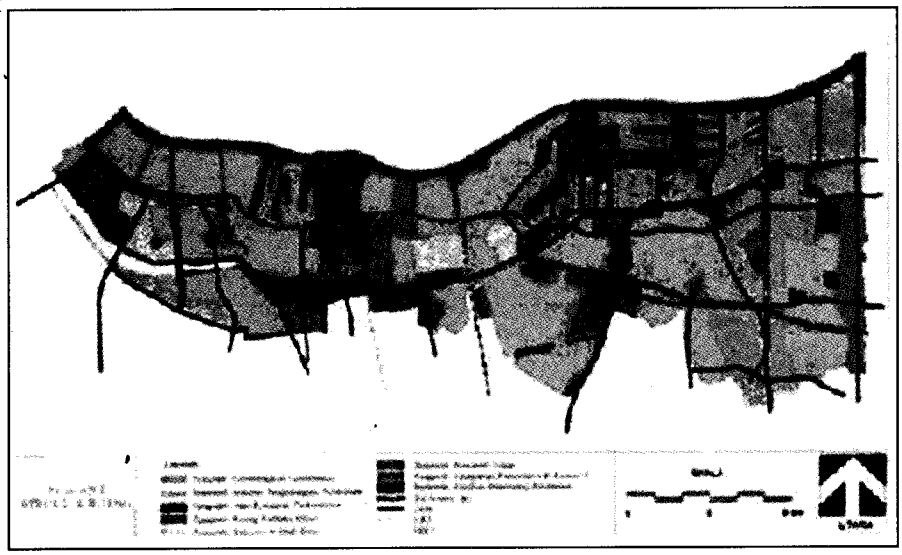

Gambar 3. Zoning pengembangan Pantura DKI Jakarta (Sumber : Indoconstructin)

2.2. Tiga Zona Kawasan Reklamasi

Tata ruang untuk kawasan reklamasi pantai Utara Jakarta ini membagi tanah reklamasi seluas 2.700 hektar menjadi tiga kawasan, wilayah barat, tengah dan timur.

1. Wilayah Barat

Untuk kawasan barat, reklamasi dilakukan mulai dari sekitar Waduk Pluit sampai Tangerang di dekat muara Sungai Cisadane, Pantai Indah Kapuk, Pluit, dan Pantai Mutiara. Peruntukan wilayah ini dititikberatkan untuk sektor perumahan. Di kawasan barat ini nantinya juga akan dibangun pelabuhan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan pantai kapuk.

2. Wilayah Tengah

Kawasan tengah direncanakan mulai dari Waduk Pluit sampai Ancol Timur. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan bisnis (perkantoran, hotel dan sebagainya), rekreasi, perumahan, dan fasilitas pelabuhan. Di wilayah ini akan difokuskan pada pembangunan area khusus bisnis *(Central Business District - CBD)* serta daerah konservasi Kota Tua (Batavia) dan Sunda Kelapa.

3. Wilayah Timur

Sementara untuk kawasan timur, reklamasi dimulai dari pelabuhan Tanjung Priok sampai Marunda. Di kawasan ini rencananya akan dibangun IPAL atau pengolahan sampah, industri, gudang, pelabuhan, tol, dan arteri.

Pada setiap kawasan akan dibentuk sub-sub kawasan, yang intinya untuk mengkhususkan sektor pembangunan, seperti tipe-tipe perumahan apa saja yang dibolehkan dibangun dan berapa ketinggian bangunan yang diizinkan. Pada subkawasan yang lain, direncanakan untuk dibangun tempat rekreasi dengan site plan yang benar-benar jelas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, Muara Baru merupakan kawasan bagian Timur wilayah Pantai Utara yang dipakai sebagai pelabuhan dan industri penunjang. Kawasan tersebut telah diberi izin hak pengelolaan sebagai hasil reklamasi pantai. Hasil reklamasi pantai yang diberi izin tersebut adalah seluas 75 hektar dengan Nomor Hak Pengelolaan HPL 1/Muara Baru. Kawasan Barat Pantai Utara Jakarta juga dilakukan reklamasi tetapi direncanakan untuk pengembangan sektor perumahan dengan luas kurang lebih 100 hektar.

2.3. Tata Ruang Kawasan Reklamasi

Pengembangan Pantura Jakarta ditetapkan berdasarkan Keppres No 52/ 1995 yang memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Gubernur KDKI Jakarta untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan Pantura Jakarta. Sebagai tindak lanjut, dikeluarkan Perda DKI Jakarta No 8/1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta, yang pelaksanannya dilakukan melalui BPR Pantura.

Program pengembangan pantura terdiri dari Pembuatan sarana dan prasarana (pembangunan infrastruktur), revitalisasi (perbaikan tempat dan lokasi yang rusak) seluas 2500 ha dan reklamasi (pengurukan pantai) seluas 2700 ha sepanjang 32 km. Peruntukannya dibagi dalam 3 zona: 1) Zona Barat untuk Kawasan Permukiman; 2) Zona Tengah untuk kawasan revitalisasi Sunda Kelapa, kawasan pusat niaga, serta kawasan rekreasi dan permukiman; 3) Zona Timur untuk kawasan Pelabuhan Tanjung Priok serta kawasan pergudangan, industri, dan pusat distribusi. Pembagian zona tersebut dimaksudkan untuk membangun suatu komunitas dengan standar tata ruang yang memenuhi syarat kehidupan sosial masyarakat yang baik (perumahan, perkantoran, ekonomi, wisata) serta kehidupan lingkungan yang bersih dan sehat (mengurangi banjir, mengurangi polusi udara dan sampah, penyediaan air bersih, menjaga resapan air tanah).

Luas masing-masing peruntukan di areal reklamasi, dari sekitar 2700 ha antara lain akan digunakan: 200 ha untuk kawasan bisnis, 1.300 ha untuk pelabuhan dan pendukung Pelabuhan Tanjung Priok (termasuk 480 ha yang sekarang), 300 ha untuk industri, 1000 ha untuk perumahan, 300 ha untuk pariwisata, 80 ha untuk taman utama, dan kawasan pantai sebagai daerah publik. Di sini akan diterapkan suatu konsep pantai sebagai wilayah publik yang bisa diakses oleh publik. Untuk perumahan, sedang di pelajari kemungkinan adanya subsidi silang pembangunan rumah susun murah untuk golongan masyarakat yang kurang mampu. Bahkan direncanakan, yang pertama kali dibangun dari hasil reklamasi ini adalah rumah susun murah di daerah Pademangan.

Tabel 1. Rencana peruntukan lahan reklamasi Pantura Jakarta

No	Peruntukan	Luas (ha)
1	Kawasan bisnis	200
2	Pelabuhan dan pendukung pelabuhan Tj Priok. (480 ha)	1.300*
3	Industri	300
4	Perumahan	1000
5	Pariwisata	300
6	Taman utama, pantai dan publik	80

III. DAMPAK BENCANA YANG AKAN DITIMBULKAN

Setiap kegiatan yang merubah sistim lingkungan memberikan dampak, baik dampak positip dan negatif. Seperti dijelaskan di muka, dampak positip dari reklamasi pantura ini adalah ketersediaan lahan 2.700 ha yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan daerah dengan berbagai kegiatan bisnis dan lainnya yang akan memberikan pemasukan yang tidak sedikit ke pemda DKI Jakarta. Tetapi perlu diingat, bahwa DKI Jakarta masih mempunyai permasalahan bencana yang tiada kunjung berakhir, yaitu banjir. Kaitan banjir dengan kondisi Jakarta adalah bahwa topografi Jakarta relatif datar dan rendah, sehingga dengan dilakukannya reklamasi di daerah pantai utara yang merupakan muara dari beberapa sungai di Jakarta akan membawa dampak negatif di dalam sistim hidrologi di Jakarta, sehingga secara sederhana banjir akan semakin sulit ditanggulangi.

Minimal ada lima dampak yang akan muncul, yaitu dampak terhadap banjir di Jakarta, gangguan operasional beberapa proyek vital, potensi konflik dengan masyarakat, kerusakan ekosistem laut, serta memperluas potensi pencemaran ke arah perairan Pulau Seribu.

3.1. Dampak Banjir

Jakarta terletak di daerah dataran rendah dengan topografi yang landai. Letak ibukota yang berbatasan dengan laut Jawa dan hanya sedikit saja di atas permukaan laut membuat Jakarta rawan terhadap bencana banjir. Sungai Ciliwung beserta anak sungainya yang mermuara di Teluk Jakarta membelah jantung kota merupakan ancaman utama terhadap bahaya bencana banjir. Dengan topografi yang landai tersebut maka air sungai tidak lancar mengalir ke laut, apalagi sewaktu air laut pasang. Aliran air sungai yang lambat dan letak Jakarta yang rendah menyebabkan banyak terjadi genangan akibat banjir.

Tigabelas (13) sistim sungai yang induknya berasal dari daerah Bogor yang mempunyai curah hujan yang tinggi menyebar di seluruh kota Jakarta. Di wilayah barat sungai yang berperan adalah Kali Mookervaart, Kali Angke, kali Pesanggrahan dan Kali Grogol. Sedangkan wilayah tengah terdiri dari Kali Krukut, Kali Baru Barat, kali Ciliwung dan Kali Baru Timur. Di wilayah timur terdiri dari kali Cipinang, kali Sunter, Buaran, Jati Kramat dan Cakung. Sungai Ciliwung yang melewati pusat kota Jakarta, masih merupakan ancaman terhadap potensi penyebab banjir. Demikian juga Cisadane, Pesanggrahan maupun yang lainnya. Reklamasi pantai di daerah rawa-rawa sepanjang wilayah pesisir mengakibatkan hilangnya fungsi daerah tampungan, sehingga memperbesar aliran permukaan. Reklamasi yang tak terkontrol juga akan menghilangkan dan atau mengubah fungsi ekologis cagar alam Muara Angke yang sangat penting bagi Jakarta. Jika direklamasi dilakukan dengan menguruk total sepanjang pantai utara dikhawatirkan meningkatkan frekuensi terjadinya banjir, oleh karena:

1. Reklamasi mengakibatkan aliran sungai di muara sungai semakin melambat karena jalur yang ditempuh semakin panjang. Karena kecepatan aliran sungai berkurang laju sedimentasi di muara pun meningkat.
2. Peninggian muka air hingga 12 cm di sepanjang sisi alur sungai yang bermuara di Teluk Jakarta akibat bertambah panjangnya alur sungai. Penerapan teknologi yang ada hanya dapat menurunkan kenaikan muka air hingga 5 cm dengan jangkauan hingga 3 km ke arah hulu. Angka ini tergantung keberhasilan proyek-proyek pengendali banjir yang umunya di luar kewenangan BP.Pantura. (Press Release Men LH, 19 April 2003).
3. Pada saat yang sama,aliran muara sungai baru akan berhadapan dengan arus laut dengan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya. Hal ini akan meningkatkan tinggi air di muara sungai.

3.2. Kerusakan Tata Air

Reklamasi Jakarta seluas 2.700 hektar akan merusak sistem tata air di wilayah pesisir lama seluas 10.000 hektar. Ketiga belas sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta akan bertambah panjang 1.5 kilometer, tetapi dasar sungai menjadi sangat landai hingga ketinggian muara baru hasil reklamasi menjadi nol meter. Air sungai akan sulit mengalir ke laut dengan rendahnya muara sungai. Diperkirakan akan terjadi kerusakan sistem tata air pada radius 8-10 kilometer dari bibir pantai lama (Dr. Arwin Sabar, Teknik Lingkungan ITB). Biaya sangat besar harus dikeluarkan untuk revitalisasi di wilayah pesisir lama, mulai dari pengerukan sungai, perbaikan saluran drainase, hingga peninggian badan jalan.. Hal lain yang perlu mendapat sorotan adalah mengenai kelangkaan air tawar. Lahan hasil reklamasi yang akan dihuni oleh lebih kurang 750 ribu orang dan pekerja pendatang tentu bakal mengakibatkan bertambahnya kebutuhan air bersih. Pengambilan air tanah juga mengakibatkan penurunan tanah. Lagi-lagi, dampaknya potensi banjir akan semakin besar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tanah yang telah terjadi di Jakarta bervariasi antara 50 cm sampai satu meter /tahun.

3.3. Konflik Sosial

Di era sekarang ini, segala kegiatan yang menyangkut penggunaan lahan sangat rentan dengan timbulnya konflik sosial. Kebutuhan hidup yang semakin sulit dipenuhi dan sulitnya mencari lapangan kerja membuat masyarakat mudah marah. Kegiatan reklamasi tak lepas dari urusan sosial kemasyarakatan, baik yang akan direklamasi maupun yang akan menggunakan lahan reklamasi. Potensi konflik akan terjadi karena pemindahan ribuan nelayan di Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Kampung Luar Batang dan pemukiman depan Taman Impian Jaya Ancol dan Marunda Pulo. Badan Pelaksana Pantura merencanakan untuk menyediakan rumah susun bagi nelayan yang dipindahkan ke Pademangan, tetapi masalah sosial yang berkaitan dengan kultur nelayan dan sosial kemasyarakatan, rumah susun sangat tidak tepat bagi kehidupan nelayan yang khas. Reklamasi mengakibatkan hilangnya mata pencaharian ribuan pembudi daya ikan yang selama ini memanfaatkan Teluk Jakarta. Potensi konflik dengan masyarakat, terutama terjadi terhadap nelayan di Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru, Kampung Luar Batang, dan permukiman padat di depan Taman Impian Jaya Ancol serta Marunda Pulo. Hilangnya mata pencarian ribuan pembudidaya ikan yang memanfaatkan teluk Jakarta selama ini, tidak pernah menjadi bahan pertimbangan. Pemda DKI tidak pernah mengkaji secara mendalam aspek sosial dari penggusuran secara besar-besaran terhadap penduduk setempat yang selama ini menjadi bagian dari sebuah lingkungan dan turut menjaga dan melestarikannya, tetapi diusir yang belum jelas mau dikemanakan dan akan bekerja apa nantinya. Sementara keahlian mayoritas di kawasan itu adalah budidaya dan menangkap ikan.

3.4. Gangguan Pada Perusahaan Penting Pelayanan Publik

Selama ini beberapa perusahaan pelayanan publik yang bersifat sangat penting terdapat pada lahan yang akan direklamasi. Beberapa proyek vital yang berada di areal rencana reklamasi, seperti PLTU, PLTGU Karang, PLTGU Muara Tawar, Pelabuhan Tanjung Priok akan terganggu karena kekhawatiran akan meningkatnya suhu air laut 1-2 derajat. Peningkatan suhu air laut tidak akan efektif untuk mendinginkan reaktor pembangkit listrik. Beberapa proyek vital berada di sekitar areal rencana reklamasi, seperti PLTU/PLTGU Muara Karang (yang menyuplai 45 persen kebutuhan listrik di Jakarta, di antaranya Istana Negara, Monas, Jl Sudirman, dan Bandara Soekarno-Hatta), PLTGU Muara Tawar, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Taman Impian Jaya Ancol). Bisa dibayangkan dampak sosial yang akan terjadi di Jakarta karena terganggunya suplai listrik karena kegiatan reklamasi ini. Sebagai contoh, listrik padam beberapa jam saja akan mengakibatkan keresahan masyarakat dan kerugian perekonomian yang sangat besar.

Pasokan listrik untuk wilayah Jakarta, termasuk daerah strategis seperti Istana Negara, Gedung MPR/DPR, dan Bandara Soekarno-Hatta, dipastikan akan terhenti jika proyek reklamasi pantai utara Jakarta jadi dilanjutkan. Penyebabnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Muara Karang akan sulit mendapatkan air pendingin dari laut. PLTU dan PLTGU Muara Karang memiliki kapasitas produksi listrik sebanyak 1.200 megawatt (MW). Kedua pembangkit ini memasok 30 persen kebutuhan Jakarta atau 10 persen dari total kebutuhan wilayah Jawa dan Bali.

Seperti pada saat reklamasi dilakukan pada tahun 1990-an, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali

(PJB), anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengoperasikan pembangkit tersebut, sudah terancam gangguan banjir. Akibat reklamasi itu, PJB sudah membangun tanggul setinggi 2,5 meter dan memperpanjang pintu air pendingin ke laut.

Jika rencana reklamasi pantura dilanjutkan, wilayah laut di sekitar pembangkit Muara Karang akan berubah menjadi daratan. Hal itu akan membuat pembangkit akan kesulitan mendapatkan air laut untuk proses pendingin. Jika air kurang, otomatis pembangkit akan mati karena suhu pembangkit tidak stabil. Bila hal itu terjadi, pembangkit jadi tidak berfungsi. Selain itu, pipa untuk pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas tidak bisa dirawat dengan baik sebab bakal tertimbun pada saat direklamasi.

Selain terhentinya pasokan listrik, pasokan gas untuk pembangkit di Tanjung Priok dan industri di Jakarta yang disuplai PT Perusahaan Gas Negara (PGN) juga akan terganggu. Sebab, terminal pipa gas di Muara Karang sebenarnya menerima pasokan dari lapangan gas BP Indonesia di Laut Jawa untuk konsumen di Jakarta.

Rencana reklamasi pantura sebenarnya sudah berlangsung sejak awal tahun 1990-an. Namun, pada tahun 1997 proyek tersebut terhenti karena krisis ekonomi. Pada tahun 2002, reklamasi kembali dilanjutkan sehingga mengancam pembangkit di Muara Karang.

3.5. Kerusakan Ekosistem Laut Daerah Lain

Pengambilan bahan urugan (pasir laut) dari daerah lain sebanyak 330 juta m^3 untuk reklamasi akan merusak ekosistem laut setempat. Dampaknya berupa penurunan hasil tangkapan nelayan, kekeruhan perairan dan aberasi pantai. Menurut informasi Kementrian LH, pasir laut rencananya diambil dari perairan Jawa Barat, dan Serang, Banten. Pada daerah ini, konsesi pengambilan pasir meliputi luas 170.000 hektar. Reklamasi itu, juga akan memperluas potensi pencemaran ke arah perairan Pulau Seribu. Berbagai aktivitas di darat baik yang terjadi pada saat kegiatan reklamasi maupun pemanfaatan lahan hasil reklamasi dapat dipastikan akan memperluas potensi pencemaran ke arah perairan Pulau Seribu. Pemda DKI Jakarta tidak pernah menilai ongkos kerusakan ekosistem seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, ikan dan ekosistem laut yang akan hilang dan terusir dari kawasan ini. Hilangnya cagar alam Muara Angke yang selama ini berfungsi ekologis strategis bagi Jakarta. Betapa tidak, dari ekosistem estuaria misalnya, yang selama ini mampu mengabsorpsi berbagai polutan dari kota Jakarta, hutan bakau sebagai tempat bertelur dan habitat ikan-ikan kecil *(Nursery)* dan hutan mangrove penangkal abrasi dan lainnya akan digantikan oleh tumpukan pasir dan semen

IV. KESIMPULAN

Dari kacamata teknis, reklamasi pantai merupakan hal biasa yang dapat dilakukan untuk memperbesar lahan dengan mengorbankan kawasan pantai. Di negara maju hal ini sudah biasa dilakukan, seperti Jepang, Eropa, Amerika dan Singapura. Secara ekonomis, reklamasi pantai sangat menguntungkan. Hal yang perlu diingat dalam reklamasi pantai adalah meminimalkan dampak yang timbul dari reklamasi pantai itu sendiri.

Kawasan Pantura Jakarta secara fisik dan geografis merupakan bagian hilir dari kawasan yang lebih luas, sehingga perubahan lingkungan yang terjadi di kawasan ini dimungkinkan merupakan kontribusi kegiatan dari wilayah di luar kawasan Pantura Jakarta. Kawasan Pantura Jakarta merupakan bagian wilayah yang terintegrasi dalam wilayah DKI Jakarta. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan kawasan Pantura Jakarta dengan demikian merupakan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang dilakukan di Jakarta, mencakup mekanisme perencanan, perijinan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan. Untuk itu rencana reklamasi Pantai Utara Jakarta akan menyangkut kepentingan banyak pihak yang akan berdampak sangat global. Keuntungan ekonomis dari kegiatan tersebut harus juga memperhitungkan kerugian yang lebih besar diderita akibat banjir, konflik sosial, kerusakan ekosistem laut dan tata air serta dampak sosial. Minimal ada lima dampak yang akan muncul, yaitu dampak terhadap banjir di Jakarta, gangguan operasional beberapa proyek vital, potensi konflik dengan masyarakat, kerusakan ekosistem laut, serta memperluas potensi pencemaran ke arah perairan Pulau Seribu. Hal tersebut yang harus disikapi secara bijaksana sehingga kedua hal kepentingan bisa berjalan secara beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti S, Dra, MSA dkk, 2002, *Investigasi Dampak Kenaikan Air Laut di Kota Jakarta.*

Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta, 2003, *Penataan dan Pengelolaan Pantai Jakarta: Reklamasi Pantura Jakarta, BP Reklamasi Pantura Jakarta.*

....., 2003, *Reklamasi Pantura Jakarta Hanya Menuai Masalah,* http://www.walhi.or.id/Indonesia.

....., 2003, *Reklamasi Pantura Jakarta Ancam Pasokan Listrik Untuk Ibukota,* 2003, Harian Kompas, 26 Juni 2003.

....., 2003, *Reklamasi Pantura Sebabkan Banjir,* Harian Republika, 1 Maret 2003.

....., 2003, Reklamasi Pantai Jakarta : *Bencana Lingkungan dan Sosial Jakarta,* http://www.walhi.or.id/indonesia.

....., 2003, *Reklamasi Pantura Jakarta Tak Layak Lingkungan,* Harian Republika 12 Juni 2003.

....., 2003, *Sekilas Jakarta dan*

BPR Pantura, http://www.jakartawaterfront/
....., 1995, Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 Tentang : Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
....., 2003, *Pengembangan Pantura Jakarta Masih Menunggu* Investor, Majalah Indoconstruction Vol. No. Tahun 2003.

DATA PENULIS

Bambang Marwanta, lulus sarjana Fisika UNPAD tahun 1992, lulus Pasca Sarjana Geofisika Terapan ITB tahun 1999. Peneliti Bidang Mitigasi Bencana, bekerja di Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Kawasan (P3 TPSLK) – BPPT dari tahun 1992 – sekarang.

PROGRAM SUBSIDI SILANG PADA REKLAMASI PANTURA JAKARTA

1. Pembenahan perumahan nelayan, fasilitas pelabuhan nelayan, termasuk tempat pendaratan ikan, tempat pengolahan ikan dan fasilitas pendukungnya.
2. Penataan kembali kawasan pantai, dengan membangun kembali kawasan kumuh, perbaikan kampung, rumah susun dan fasilitas yang diperlukan.
3. Pembangunan fasilitas pelabuhan nelayan, termasuk pendaratan ikan, tempat pengolahan ikan, serta fasilitas publik yang diperlukan.
4. Revilatalisasi kota tua, termasuk pelestarian bangunan-bangunan bersejarah.
5. Pelestarian kawasan hutan lindung, mangrove dan lain-lain.
6. Pembuatan pantai untuk publik, termasuk pantai yang ada sekarang.
7. Pembuatan infrastruktur makro untuk melayani daerah reklamasi, termasuk jalan arteri, air bersih, sludge disposal, serta instalasi pengolahan limbah.
8. Pembersihan dan normalisasi 13 muara sungai, membantu pembuatan banjir kanal dan sarana pencegahan banjir lainnya.

PROGRAM PENATAAN PANTAI YANG ADA YANG PERLU DILAKSANAKAN DALAM RANGKA SUBSIDI SILANG *)

KANAL, SALURAN DAN JALAN

1. Kanal Tunjunagn
2. Cengkareng Drain
3. Muara Angke
4. Banjir Kanal
5. Kali Blora
6. Anak Kali Ciliwung
7. Kali Mati
8. Kali Kresek
9. Rawa Badak
10. Jalan Cacing
11. Waduk Semper
12. Cakung Drain
13. Rawa Terate
14. Rawa Getel

KAWASAN PELESTARIAN HERITAGE DAN ALAM

1. Kampung Nelayan
2. Kp. Luar Batang
3. Sunda Kelapa
4. Kota
5. Si Pitung
6. Desa Tugu
7. Hutan Bakau
8. Hutan Linduing

KAWASAN PERBAIKAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

1. Kapuk Muara
2. Penjaringan
3. Papanggo
4. Sunter Jaya
5. Rawa Badak
6. Lagoa
7. Tugu Utara
8. Kali Baru
9. Sukapura
10. Kamal Muara
11. Kawasan Bentengan Sunter
12. Marunda
13. Muara Kamal

RELOKASI GUDANG/ INDUSTRI

1. Sunter
2. Kawasan Kota Lama
3. Kawasan Ancol Barat

*) Dapat berkembang menurut keadaan lapangan
Sumber : BP Pantura, 2003